

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan secara nasional merupakan suatu upaya multidimensional yang melibatkan perubahan dari berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006). Berkaitan dengan arah pembangunan nasional, maka tujuan setiap daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada tiap daerah sangat dibutuhkan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pembangunan nasional sendiri terdiri dari sektor ekonomi maupun non ekonomi, namun sektor ekonomi merupakan sektor yang paling mendominasi dalam pembangunan nasional. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 pembangunan ekonomi nasional adalah tercapainya suatu struktur ekonomi yang seimbang yaitu tercapainya keadaan perekonomian Negara yang memiliki struktur yang kuat. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dapat menciptakan kegiatan produksi,

dengan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan di dalam negeri sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi serta disesuaikan dengan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Boediono (1999:1-2) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Secara lebih dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan berdampak pada kenaikan pendapatan yang diterima setiap masyarakat dan akan mempengaruhi kesejahteraan setiap masyarakat. Agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara maka diperlukan kontribusi dari setiap daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekonomi setiap daerah. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 yang menjelaskan tentang otonomi daerah, bahwa daerah memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu tujuan adanya Otonomi daerah yaitu mensejahterakan masyarakat dalam suatu wilayah dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut. Di era otonomi daerah ini setiap daerah diharapkan dapat

mengidentifikasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah yang nantinya dapat dikembangkan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan pembangunan yang tepat dengan memperhatikan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Pada awalnya, sektor pertanian merupakan sektor utama yang berkontribusi besar bagi masyarakat. Seiring era modernisasi, sektor Industri berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut juga didukung oleh kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia, maka sektor manufaktur ini mengalami peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian (Kuncoro, 2007:96). Sektor industri kini dijadikan sebagai prioritas pembangunan dan diharapkan mempunyai peranan sebagai leading sektor atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010:442).

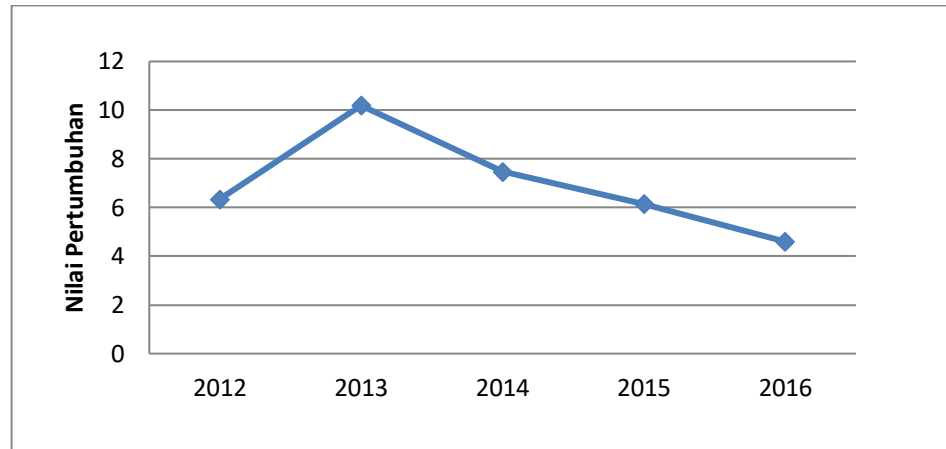
Perkembangan sumbangan sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami perubahan yang fluktuatif namun secara konsisten menunjukkan proporsi persentase sumbangan sektor industri yang lebih besar dari pada sektor pertanian yang awalnya menjadi penopang perekonomian Indonesia. Industrialisasi berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas

kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan juga masih memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kinerja perekonomian provinsi-provinsi khususnya Wilayah Jawa. Menurut Alisjahbana (2014:11) pada kajiannya, Daerah yang memiliki potensi ekonomi sebagai pendorong industri nasional adalah Jawa. Hal ini disebabkan karena banyaknya industri yang berkembang di daerah Jawa. Berdasarkan data dalam Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2016:1) 74,19% industri di Indonesia berada di Pulau Jawa sedangkan sisanya berada di luar Pulau Jawa. Konsentrasi terbesar Industri Pengolahan di Pulau Jawa berada di Provinsi Jawa Tengah sebesar 23,14 % (dari total nasional), Provinsi Jawa Timur sebesar 19,49 %, Jawa Barat sebesar 13,85 %. Sementara Dominasi Industri Pengolahan kedua berada di Pulau Sumatera, Khususnya Sumatera Utara sebesar 2,88 %.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang mendominasi sektor Industri pengolahan di Pulau Jawa. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, lapangan usaha Industri Pengolahan tahun 2016 masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah dengan peranan di atas 30 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Empat lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan sebesar 73,5 persen pada tahun 2016. Industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki PDRB paling besar kontribusinya dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 295,9 Milyar Rupiah pada Tahun 2016 (BPS 2017). Kabupaten Cilacap menduduki urutan pertama dengan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tertinggi sebesar 65.319.911 (juta rupiah) dan di urutan ke dua Kabupaten Kudus sebesar 53.304.531 (juta rupiah). Berbeda jauh dari Kabupaten Cilacap dan Kudus, di urutan dua terendah ada Kota Tegal dengan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 1.337.906 (juta rupiah) dan Kota Magelang sebesar 826.944 (juta rupiah).

Kota Tegal merupakan salah satu kotamadya yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan patut dijadikan fokus perhatian karena memiliki nilai PDRB Industri Pengolahan yang rendah dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Kota Tegal yang memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, karena letaknya yang berada di jalur nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Jawa dan sangat mendukung proses pendistribusian perekonomian.. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah Kota Tegal menyusun sebuah strategi guna mengembangkan sektor Industri untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Tegal.



Sumber: BPS Kota Tegal, 2017

GAMBAR 1.1

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan di Kota Tegal tahun 2012-2016 mengalami laju pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Pada gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Laju pertumbuhan sektor Industri pengolahan di Kota Tegal mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 10,19 persen dibanding tahun 2012 hanya memperoleh laju pertumbuhan sebesar 6,34 persen. Tahun 2014 laju pertumbuhan sektor industri mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,48 persen, dan terus mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 6,15 persen, hingga titik akhir penurunan di tahun 2016 sebesar 4,6 persen.

Untuk mengetahui suatu sektor dianggap memiliki keunggulan kompetitif dan dianggap sebagai sektor basis, diperlukan sebuah pengukuran konsentrasi dari suatu kegiatan industri dalam suatu daerah

dengan peranan industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam suatu wilayah perekonomian. Perhitungan basis *location quotient* (LQ) tersebut menggunakan variable PDRB atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi daerah (Licolin Arsyad, 1999).

TABEL 1.1
Perhitungan *Location Quotient* Sektor Industri Pengolahan Kota Tegal
Tahun 2012-2016

2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata LQ
0,38	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40

Sumber: BPS Kota Tegal, 2017 (diolah)

Berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ) sektor Industri pengolahan di Kota Tegal tahun 2012-2016 menunjukkan rerata nilai $LQ < 1$. Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2012 nilai LQ sektor Industri di Kota Tegal sebesar 0,38. Pada tahun 2013 nilai LQ yang didapat sebesar 0,40. Pada tahun 2014 nilai LQ masih stagnan di angka 0,40. Pada tahun 2015 nilai LQ berubah ,menjadi 0,41, dan pada tahun 2016 nilai LQ sektor Industri di Kota Tegal sebesar 0,41. Hasil dari rerata LQ yang didapat dari perhitungan adalah 0,40 ($LQ < 1$) atau dengan kata lain bahwa sektor Industri Pengolahan bukan merupakan sektor basis di Kota Tegal.

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan posisi kategori Industri Pengolahan terendah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, perlu

adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor Industri Pengolahan menjadi sektor basis dan mampu mendongkrak perekonomian di Kota Tegal. Pemerintah diharapkan berupaya penuh membuat sebuah kebijakan guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat perlu di lakukan guna mengolah potensi yang ada dan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Tegal.

Peran sektor Industri pengolahan merupakan sebuah sektor yang memiliki peluang dan potensi besar untuk dikembangkan agar menjadi jantung perekonomian daerah guna mensejahterakan masyarakatnya sesuai yang sudah tertuang dalam misi Kota Tegal. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya saing dan peranan sektor Industri pengolahan terhadap tenaga kerja serta strategi pengembangannya.

B. Batasan Masalah

Luasnya jangkauan pembahasan mengenai pembangunan ekonomi jika dikaji secara umum, untuk itu peneliti membuat batasan masalah agar memiliki koridor pembatas dalam membahas penelitian ini. Batasan masalah dari penelitian ini adalah mengkaji daya saing sektor Industri pengolahan di Kota Tegal. Kedua adalah apakah dampak yang diberikan dari sektor Industri Pengolahan terhadap pembangunan daerah dengan indikator tenaga kerja. Terakhir tentang strategi pengembangan

sektor Industri Pengolahan yang ada di Kota Tegal. Tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana daya saing sektor Industri Pengolahan Kota Tegal?
2. Bagaimana peranan sektor Industri Pengolahan Kota Tegal terhadap perkembangan wilayah berdasarkan Indikator tenaga kerja?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor Industri pengolahan Kota Tegal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui daya saing sektor Industri pengolahan di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui peranan sektor Industri Pengolahan terhadap perkembangan wilayah berdasarkan Indikator tenaga kerja.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor Industri Pengolahan di Kota Tegal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, baik itu berupa informasi, maupun edukasi yang berguna dikemudian hari. Manfaat itu antara lain :

1. Bagi Penulis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana aplikatif dalam menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan.

2. Bagi Mahasiswa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan juga menjadi sarana edukatif untuk para mahasiswa tentang Sektor Industri Pengolahan di Kota Tegal.

3. Bagi Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi publik mengenai kondisi Sektor Industri Pengolahan di Kota Tegal.

4. Bagi Pemerintah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam memformulasikan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang Industri Pengolahan Kota Tegal.

